

|

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS
PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA
BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA BANDA ACEH**

Cut Yunina Eriva¹⁾, Totok Rudianto²⁾, Amalia Mizlina³⁾

^{1,2)} Dosen Politeknik Aceh, ³⁾Mahasiswa Prodi Sartjana Terapan Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Aceh

Email:¹⁾ cut.eva@politeknikaceh.ac.id, ³⁾ruffanirma@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan kualitas teknologi informasi terhadap kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus sehingga observasi sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 responden. Metode data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan baik secara parsial maupun simultan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh. Besarnya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh adalah 84,7% dan besarnya pengaruh kualitas teknologi informasi secara parsial terhadap kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah 24,5%.

Kata Kunci : *Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Teknologi Informasi, Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)*

1. PENDAHULUAN

Salah satu isu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah adalah rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya berhubungan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Seperti yang dijelaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh (2020), yaitu beberapa hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Pembayaran tenaga ahli yang tidak didukung standar biaya;
- 2) Pemberian bantuan atau pengelolaan belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- 3) Adanya kelebihan pembayaran pekerjaan.

Pencairan dana merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebab tanpa proses tersebut, tidak akan berdampak pada pembangunan perekonomian suatu daerah. Ketepatanwaktuan pencairan dana sejalan dengan peningkatan akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah. Pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) merupakan pelayanan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah berdasarkan ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu Pemerintah Daerah Tingkat II yang dikepalai oleh Walikota dan Wakil Walikota yang terletak di Provinsi Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Untuk pertanggungjawaban, Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2019 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti yang diberitakan oleh detik.com (16 Juni 2020) dan bandaacehkota.go.id (16 Juni 2020). Dengan hasil tersebut, maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah mendapatkan opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut sejak 2009. Opini WTP diberikan setelah BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian laporan

keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Umum Daerah memiliki salah satu tugas yaitu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kesuksesan Bendahara Umum Daerah dalam melakukan aktivitas yang berkualitas tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas itu sendiri dan penggunaan teknologi informasi yang berkualitas juga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengangkat judul “**Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Teknologi Informasi terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh**”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Pengertian Kualitas Sumber Daya

Primayana *et al*, (2014) menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikannya

kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggung jawab tersebut diuraikan di dalam *job description*. Dengan *job description* yang jelas akan dapat membantu seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik.

2.1.2 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea dan Nurianna (2008:62) indikator kualitas sumber daya manusia antara lain :

1. Pemahaman bidang kerja

Adanya pemahaman pegawai terkait dengan bidang kerja yang diberikan oleh atasan akan memudahkan mereka dalam bekerja.

2. Pengetahuan

Adanya pengetahuan pegawai dalam menjalankan tugas kerja yang diberikan dapat mempermudah mereka dalam menyelesaikan tugas kerja.

3. Kemampuan

Para pegawai memiliki yang kemampuan dalam menjalankan berbagai tugas kerja yang diberikan akan lebih efisien dalam bekerja.

4. Semangat kerja
Adanya semangat kerja dalam diri pegawai dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka.
5. Kemampuan perencanaan
Pegawai yang memiliki kemampuan dalam perencanaan pegawai sangat membantu mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu.

2.1.3 Pengertian Kualitas Teknologi Informasi

Romney dan Steinbart (2005) menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

2.1.4 Indikator Kualitas Teknologi Informasi

Pengukuran kualitas teknologi informasi yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan teori dari Jogyanto (2005:10) yang menjelaskan bahwa indikator yang digunakan antara lain akurasi output, ketepatan waktu output, dan relevansi output, lebih jelas sebagai berikut :

1. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Informasi harus memiliki keakuratan tertentu agar tidak diragukan kebenarannya.
2. Tepat pada waktunya, informasi yang datang pada penerima tidak boleh datang terlambat, karena informasi yang datang tidak tepat waktu, tidak bernilai lagi, sebab informasi digunakan dalam proses pembuatan keputusan.

Relevan, informasi yang ada memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemakainya. Informasi memiliki tingkat relativitas yang berbeda, tergantung pada tingkat pemakai.

2.1.5 Pengertian Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai

dasar pencairan dana atas Beban APBD. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat atau dokumen yang diterbitkan oleh kuasa BUD yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa BUD berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam prenelitian ini adalah berupa data-data pendukung. Jenis dan sumber data dikumpulkan terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan daya diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari wawancara Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk menggumpulkan data-data yang berhubungan dengan penulis proyek akhir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut yaitu:

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung atau pengamatan pada objek,
2. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapat data melalui literatur dan buku-buku ilmiah.
3. Wawancara yaitu dengan pengumpulan data dengan

memberikan pertanyaan tentang penelitian.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peralatan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Adapun rumus analisis regresi linier berganda menurut Sugiyono (2017:277) adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Di mana :

Y = Kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

α = Konstanta

X_1 = Kualitas Sumber Daya Manusia

X_2 = Kualitas Teknologi Informasi

β_1 dan β_2 = Koefisien regresi X_1 dan X_2

ε = *Error term*

4. Metode Pembahasan Data

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hasil koefisien kualitas sumber daya manusia (X_1) sebesar 0,847, artinya bahwa setiap 100% perubahan dalam variabel kualitas sumber daya manusia, maka secara relatif akan mempengaruhi kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh sebesar 84,7%, maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin mempengaruhi kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih, Magdalena Idda (2016) tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bulungan. Hasil analisis regresi menunjukkan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengaruh Kualitas Teknologi Terhadap Kualitas

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hasil koefisien regresi kualitas teknologi informasi (X_2) sebesar 0,245, artinya bahwa setiap 100% perubahan dalam variabel kualitas teknologi informasi, maka secara relatif akan mempengaruhi kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh sebesar 24,5%, dengan demikian semakin baik kualitas teknologi informasi maka akan semakin mempengaruhi kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mahlida dan Pigo (2017), dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dalam Menghasilkan Pelaporan Keuangan Daerah yang Berkualitas (Studi Empiris pada OPD Kota Bandar Lampung dan Kota Metro), Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Teknologi Informasi dalam Menghasilkan Pelaporan Keuangan Daerah yang Berkualitas pada OPD Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dengan tingkat signifikansi 0,000.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi linier berganda maka dapat dilihat hipotesis yang diuji yaitu uji secara simultan (Uji F) dimana nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($35,613 > 3,209$), artinya variabel kualitas sumber daya manusia dan kualitas teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih, Magdalena Idda (2016) tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bulungan. Hasil analisis regresi menunjukkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah (BUD), serta penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ihwan, Tri, Widarto (2018)

dengan judul Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi, Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satker Vertikal Kementerian Kesehatan Wil Propinsi DKI Jakarta) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi, Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satker Vertikal Kementerian Kesehatan Wil Propinsi DKI Jakarta, dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh.
2. Kualitas teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh.

3. Kualitas sumber daya manusia dan kualitas teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh.

Saran

1. Diharapkan pimpinan untuk dapat menempatkan variabel kualitas sumber daya manusia dan kualitas teknologi informasi sebagai salah satu tolak ukur dalam meningkatkan kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
2. Pihak pimpinan pada Bendahara Umum Daerah Kota Banda Aceh hendaknya memberikan perhatian yang lebih tinggi lagi terhadap pengelolaan kualitas teknologi informasi karena variabel ini juga dapat meningkatkan kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D).daerah seperti
pelatihan dan lain sebagainya.

<http://bpkk.bandaacehkota.go.id/?p=3813>.

DAFTAR REFERENSI

Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek. Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Aziz, Nur Jannah Abdi., Umi Pratiwi dan Eko Suyono. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Volume 20, Nomor 04 Tahun 2018, hal. 1-12.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019-atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan. Nomor: 4.C/LHP/ XVIII. BAC /06 /2020, tanggal 11 Juni 2020.

Bpkk.bandaacehkota.go.id. 2015. Pelatihan Operator Modul Agenda SPM. <https://bpkk.bandaacehkota.go.id/?p=3007>.

BPKK (2021) *Bank Aceh Serahkan Touchscreen Layanan E-SP2D Kepada Pemko Banda Aceh*, Diakses pada Tanggal 2 Januari 2022 dari Website

Bandaacehkota.go.id. 2020. Pemko Banda Aceh raih WTP ke-12 berturut-turut dari BPK-RI. Disadur dari: <https://bandaacehkota.go.id/berita/22426/pemko-banda-aceh-raih-wtp-ke-12-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri.html>, tanggal 16 Juni 2020, disadur tanggal 30 Desember 2020.

Detik.com. 2020. 12 Kali berturut-turut, Banda Aceh pertahankan opini WTP BPK. Disadur dari: <https://news.detik.com/berita/d-5056407/12-kali-berturut-turut-banda-aceh-pertahankan-opini-wtp-bpk>, tanggal 16 Juni 2020, disadur tanggal 30 Desember 2020.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang. BPFE Universitas Diponegoro.

Gowinda K., Gita. 2010. *Analisis Perilaku Penerimaan Pajak Terhadap. Efiling*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha, 2008. *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Indriasari, Desi., dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan

- Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir). *Tesis*, S2 Ilmu Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ihwan, Muhammad Nur, Tri Widyastuti, dan Widarto Rachbini (2018) Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi, Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satker Vertikal Kementerian Kesehatan Wil Propinsi DKI Jakarta). *Jurnal AKRAB JUARA*. Vol. 3, No. 3.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, pg. 305-360.
- Jogiyanto, H.M., 2005. *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan. Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: ANDI.
- Kusumaningsih, Magdalena Idda (2016) *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan*. Masters Thesis, Universitas Terbuka.
- Ma'in dan Abdul M.. 2008. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI
- Mahlida, Rindu R. Gamayuni, dan Pigo Nauli. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dalam Menghasilkan Pelaporan Keuangan Daerah yang Berkualitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 22, Nomor 2, Juli 2017, halaman 163-176.
- Mahendra, Ryan. 2016. Pengaruh Dukungan Atasan, Pelatihan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah
- Sukmaningrum dan Harto. 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota*

Semarang). Fakultas
Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro,
Semarang

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV. Alfabeta.

Umar, H. 2010. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Widianingrum, Celviana dan Rahmawati, 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi, studi empiris, di pemda subosukawonosseraten, *Simposium Nasional Akuntansi XII Purwakarta*.